

## Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020

Marselino Yuda Pratama<sup>\*</sup>, Dewi Rahmi, Ima Amaliah

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*marcelyudha9@gmail.com, dewirahmi484@gmail.com, amalia.dasuki@gmail.com

**Abstract.** The population density in Indonesia is concentrated on the island of Java. The population on the island of Java is also followed by an increase in the number of the workforce. Efforts to increase labor absorption are certainly inseparable from factors that influence it, such as investment, wages and the Human Development Index (IPM). This study aims to determine the effect of Investment, Human Development Index, and Provincial Minimum Wage (UMP) on employment in Java in 2010-2020. The data in this study are secondary data, namely data from the Central Statistics Agency with a total sample of 6 provinces on the island of Java. The analytical method used is quantitative. This study uses panel data analysis with the Fixed Effect Model (FEM) approach, which was obtained based on the results of the Chow test and Hausman test. The results showed that the investment level and the Human Development Index (IPM) had a significant positive effect on employment in Java, while the Provincial Minimum Wage (UMP) had a negative effect on employment in Java. This shows that efforts to increase labor absorption through various programs and activities as well as increasing community productivity can have an impact on equal employment opportunities.

**Keywords:** *Demand and Supply of labor.*

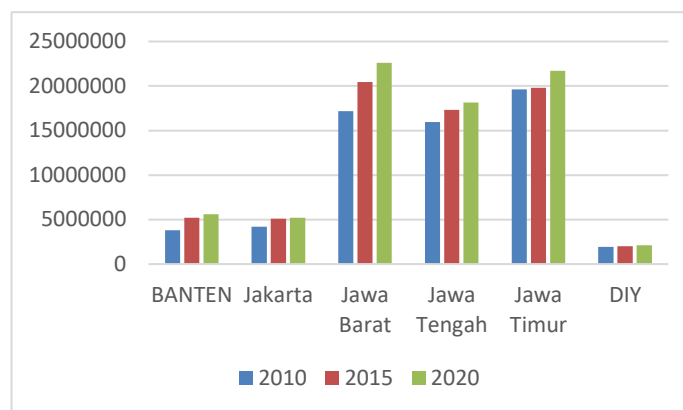
**Abstrak.** Kepadatan penduduk di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Jumlah penduduk di pulau Jawa juga diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti investasi, upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa tahun 2010-2020. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah sampel 6 provinsi di pulau Jawa. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang diperoleh berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui berbagai program dan kegiatan serta peningkatan produktivitas masyarakat dapat berdampak pada pemerataan kesempatan kerja.

**Kata Kunci:** *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.*

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin lama semakin bertambah diiringi dengan terus meningkatnya angkatan kerja yang menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini bisa disebabkan karena belum berfungsinya sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian suatu daerah. Penyediaan tenaga kerja yang cukup dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja melihat banyaknya para pencari kerja saat ini.

Kontribusi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan luar pulau Jawa. Jumlah tenaga kerja di pulau Jawa saat ini mencapai 56.571.944 orang atau 63,38% dari jumlah pekerja di Indonesia (BPS, 2019). Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan para pencari kerja agar tidak terjadi pengangguran.



**Gambar 1.** Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik Diolah 2020

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar masih didominasi di daerah Jawa Barat, karena jumlah investasi menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terbesar adalah di Jawa Barat sekitar 98 triliun rupiah, bahkan yang terbesar di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Dari peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat ini mempengaruhi pengurangan tingkat pengangguran yang ada di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,12% menjadi 5,01 yang awalnya 5,13% pada Februari 2020. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi yakni 7,73%, namun angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran.

Masalah pokok dalam ketenagakerjaan tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Tujuan akhir pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh semua negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas serta menciptakan pemerataan pendapatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara salah satunya dicerminkan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi. Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi, namun lebih luas dari itu, yaitu juga dapat menghapuskan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2015:16-24), namun pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja di Indonesia kurang merata karena hanya terfokus di pulau Jawa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Pada Tahun 2010-2020”

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *pooled least square* yang dianalisis dengan software *Eviews 7*. Populasi penelitian ini adalah enam provinsi yang ada di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk *times series* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, dan data *cross-section* provinsi, sehingga merupakan data panel atau *pooled the data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2010 sampai 2020) dengan data *cross-section* (lima provinsi).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data diolah dengan menggunakan metode analisis regresi data panel yang meliputi periode waktu 2010-2020 dengan jumlah observasi data 6 provinsi di Pulau Jawa. Terdapat beberapa metode yang dapat dipakai dalam mengestimasi model regresi data panel, seperti *Common Effects*, *Fixed Effects* dan *Random Effects Model*. Untuk memilih model regresi yang lebih tepat dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

### Uji Chow

Berdasarkan hasil uji, diperoleh hasil nilai probabilitas 0.0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  (5% atau 0.05), maka kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak **H<sub>0</sub>**, sehingga *fixed effect model* lebih baik untuk digunakan daripada *common effect model*.

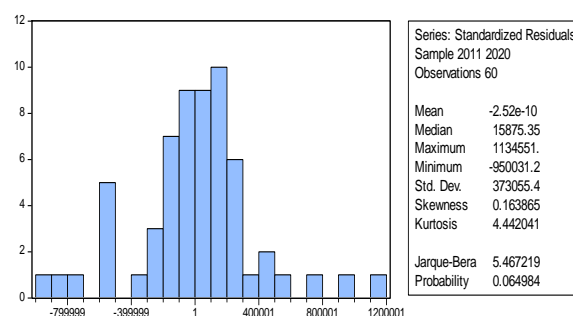
### Uji Hausman

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa angka probabilitas *Cross-section random* sebesar 0.0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  (5% atau 0.05), maka kesimpulan dari hasil uji *Hausman* adalah menolak **H<sub>0</sub>**, sehingga *fixed effect model* lebih baik untuk digunakan daripada *random effect model*.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat normal atau tidaknya data yang di analisis.



Gambar 2. Uji Normalitas

Nilai *Jarque-Bera* sebesar 5,467219 sedangkan nilai *Probability* sebesar 0.064984, jadi nilai *probability* lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau  $0.064984 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada variabel penelitian berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 95%.

## 2. Uji Multikolinearitas

Menurut (Imam Ghozali, 2013) Multikolinearitas dapat dilihat melalui korelasi di antara variabel bebas. Jika hasil diantara variabel bebas di atas 0.90 artinya terdapat masalah multikolinearitas.

**Tabel 1.** Uji Multikolinearitas

	<b>INVEST(-1)</b>	<b>IPM</b>	<b>UMP</b>
<b>INVEST(-1)</b>	1.000000	0,249546	0.634257
<b>IPM</b>	0.249546	1.000000	0.667745
<b>UMP</b>	0.634257	0.667745	1.000000

Berdasarkan hasil diatas, tidak terdapat korelasi antar variabel yang melebihi 0.90, yang artinya model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastis

Menurut (Ghazali, 2011) pengujian heterokedastisitas memiliki kriteria yaitu jika tingkat signifikan diatas 5%, berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas tetapi jika dibawah tingkat signifikan 5% maka terjadi gejala heterokedastisitas. Pada penelitian ini pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser sebagai berikut:

**Tabel 2.** Uji Hetoskedastis

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	1012399.	1934289.	0.523396	0.6030
<b>INVEST(-1)</b>	5.55E-10	1.13E-09	0.489783	0.6264
<b>IPM(-1)</b>	-13281.51	29399.86	-0.451754	0.6534
<b>UMP</b>	0.022341	0.096722	0.230984	0.8183

Berdasarkan hasil pengujian diatas, tingkat signifikansi variabel bebas yaitu Investasi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan UMP (Upah Minimum Provinsi) berada di atas 0.05 yang artinya tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

## Uji Statistik

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil regresi yang sudah dilakukan (tabel 4.3) diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0.997707, yang menunjukkan variabel-variabel independen (investasi, ipm, dan ump) mampu menjelaskan 99.7% terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja), sedangkan 0.3% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

### 2. Uji T

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (dengan asumsi variabel lain nilainya konstan) menggunakan uji t-Statistik. Variabel Investasi menunjukkan angka signifikansi (*p-value*) sebesar  $0.0126 < 0.05$  dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0.05$ ) yang menggambarkan bahwa  $H_0$  ditolak. Variabel IPM menunjukkan angka signifikansi (*p-value*) sebesar  $0.0000 < 0.05$  dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0.05$ ) yang menggambarkan bahwa  $H_0$  ditolak. Variabel UMP menunjukkan angka signifikansi (*p-value*) sebesar  $0.0006 < 0.05$  dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0.05$ ) yang

menggambarkan bahwa  $H_0$  ditolak.

### 3. Uji F

Berdasarkan hasil diatas diperoleh f statistik sebesar 2773,854 dengan probabilitas f statistiknya sebesar  $0.000000 < \alpha 5\%$ , yang artinya  $H_0$  ditolak. Variabel independen yaitu tingkat Investasi, IPM, dan Upah minimum secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja.

### Hasil Estimasi Model

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan eviews 9 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	-16784847	3939630.	-4.260514	0.0001
<b>INVEST (-1)</b>	6.76E-09	2.31E-09	2.930478	0.0051
<b>IPM(-1)</b>	383842.6	59879.67	6.410234	0.0000
<b>UMP</b>	-0.726550	0.196996	-3.688139	0.0005

Dari hasil estimasi diatas, maka persamaan model dari variabel pengaruh Investasi, UMP, dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 UMP_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y= Penyerapan Tenaga Kerja

IPM= Indeks Pembangunan Manusia

INV = Investasi

$\beta_0$ = Konstanta

UMP= Upah Minimum Provinsi

$\beta_1, \beta_2,$  = Koefisien regresi variabel bebas

i= Data *Cross-Section* ( 6 provinsi di pulau Jawa )

t= *Time Series* ( tahun 2010-2020 )

e= *Error Term*

Hal ini menunjukkan

1. Kondisi semua variabel independen investasi, IPM dan UMP dianggap konstan maka nilai penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan mengalami penurunan sebesar 16.784.847 pekerja
2. Variabel INVEST bernilai 0.00000000676. Artinya setiap kenaikan Investasi sebesar 1 triliun, maka akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa sebanyak 6760 pekerja
3. Variabel IPM bernilai 383842,6 Artinya setiap peningkatan IPM sebesar 1 maka akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 383.842 ribu pekerja
4. Variabel UMP bernilai -0.726550. Artinya setiap peningkatan UMP sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 726.550 pekerja.

### Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji t diatas, tingkat investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa pada tahun 2010-2020. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis dugaan peneliti bahwa terdapat pengaruh antara tingkat investasi dengan penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa. Todaro (2000:137-138), investasi memainkan peran penting dalam

menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Desi Meilasari (2020), dan Febryana Rizqi Wasilaputri (2016). Hasil penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 0.00000000676 dan probabilitas sebesar 0,0051 yang artinya investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dimana setiap kenaikan investasi sebesar 1 triliun akan menyerap tenaga kerja sebanyak 6760 pekerja.

Adanya investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi ini akan meningkatkan faktor produksi, termasuk tenaga kerja adanya investasi ini akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Data penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa mengalami peningkatan pada tahun 2010-2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika Investasi meningkat maka tingkat penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat begitu juga sebaliknya. Kenaikan tingkat investasi di pulau Jawa ini didominasi di provinsi Jawa Barat dimana para investor sangat tertarik untuk berinvestasi disana khususnya sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Investasi di pulau Jawa ini mencapai 55 % dari total investasi Indonesia yakni 3.047,2 triliun.

Dari hasil perhitungan di atas tingkat investasi di pulau Jawa dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 5890 pekerja. Jumlah ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan variabel lain seperti IPM dan UMP karena Investasi padat modal dan teknologi meningkatkan level industri. Namun, di sisi lain, investasi yang tidak lagi padat karya membuat serapan tenaga kerja semakin terbatas. Serapan tenaga kerja yang semakin terbatas, termasuk di sektor formal, bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada triwulan III-2019 sebesar Rp 205,7 triliun. Adapun tenaga kerja yang terserap sebanyak 212.581 orang.

### **Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil uji t di atas, IPM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan nilai koefisien sebesar 383842,6 dan tingkat probabilitas 0,0000 dimana setiap kenaikan IPM sebesar 1 maka akan menyerap tenaga kerja sebanyak 383.842 pekerja. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis dugaan peneliti bahwa terdapat pengaruh antara tingkat IPM dengan penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Agam Nurhardiansyah, Nanik Istiyani, Fajar Wahyu P (2017).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk di setiap provinsi Pulau Jawa yakni berupa tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak (dalam satuan indeks/tahun). Kenaikan IPM di pulau Jawa di setiap tahunnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa berhasil karena dengan sumber daya alam yang melimpah kesejahteraan masyarakatnya harusnya jauh lebih tinggi. Bisa dilihat lagi bahwa IPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini berarti bisa dikatakan bahwa indikator dari IPM semakin berkembang dan seharusnya pertumbuhan ekonomi pulau Jawa juga baik Menurut Idris (2016:30) penerapan dari pendekatan teori *human capital* adalah pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena tidak saja menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja dapat tercermin dalam tingkat penghasilan. Faktor kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sehingga peningkatan di bidang kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah. Rendahnya tingkat kesehatan disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan yang tercermin dalam tingkat upah dan pengeluaran rumah tangga yang rendah. Dengan adanya perbaikan tingkat hidup juga dapat menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas ini akan ikut menunjang pada peningkatan produktivitas yang akan meningkatkan pendapatan dan tingkat kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tingginya IPM mempengaruhi tenaga kerja dalam memperoleh sebuah pekerjaan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) digambarkan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pengetahuan (*knowledge*) digambarkan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak (*decent standard of living*) digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH di Pulau Jawa sendiri rata rata pertahun sebesar 72,79 tahun yang artinya bayi yang memiliki peluang untuk hidup hingga umur 72,79 tahun. Semakin lama Angka Harapan Hidup, maka kualitas kesehatan di wilayah tersebut semakin baik. Apabila IPM di suatu daerah rendah maka kualitas dan produktifitas masyarakat di daerah tersebut akan kurang baik dimana akan sulit bagi masyarakat tersebut mencari pekerjaan, rendahnya IPM menyangkut dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran akibat dari minimnya kesempatan kerja. Indeks pembangunan manusia di pulau Jawa menjadi yang tertinggi nilai IPM nya di Indonesia dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai rata rata IPM diatas 7. Penduduk usia produktif yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan dan pendorong dalam menghasilkan output suatu wilayah. Kaitannya dengan indeks pembangunan manusia maka, apabila indeks pembangunan manusia menunjukkan kondisi baik setidaknya banyak tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran usia produktif.

### **Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil uji t diatas, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif signifikan terhadap Penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisien sebesar -0.726550 dan nilai probabilitas sebesar 0,0005 dimana setiap kenaikan UMP sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 726.550 pekerja. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis dugaan peneliti bahwa terdapat pengaruh antara Upah Minimum dengan penyerapan tenaga kerja, dimana kenaikan Upah Minimum Akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Desi Meilasari (2020), Agam Nurhardiansyah, Nanik Istiyani, Fajar Wahyu P (2017), Latri Wihastuti & Henny Rahmatullah (2018).

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kalangan ahli dari mazhab klasik yaitu Malthus dan John Stuart Mills yang mempunyai kesan pesimisme terhadap tingkat upah yang hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Malthus berpendapat bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah tetapi dengan berkurangnya jumlah penduduk justru akan mengangkat tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. Jadi, tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Pulau jawa sendiri memiliki tingkat upah minimum yang tinggi dibanding pulau lain dengan rata rata 3.000.000 – 4.000.000 perbulan pada tahun 2020 khususnya di provinsi DKI Jakarta dan yang terendah yakni di provinsi Jawa Tengah.

Setiap tahunnya semua provinsi di pulau jawa terus mengalami kenaikan tingkat upah dari tahun 2010 – 2020 data ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya. Melalui peningkatan upah tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kenaikan upah memang dapat menaikkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi masyarakat, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah juga dapat berdampak negatif bagi kesempatan kerja tersebut. Perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan, apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga dapat mendorong perusahaan meningkatkan harga barang produksinya dimana akan berdampak pada menurunnya minat

konsumen, hal ini membuat banyak hasil produksi yang tidak terjual akibatnya perusahaan lebih memilih mengurangi jumlah produksi atau malah menurunkan harga produksinya. Pengurangan jumlah produksi ini pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) selama periode tahun 2010 - 2020, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010 – 2020 dengan koefisien sebesar 0.00000000676. Sehingga ketika tingkat investasi meningkat sebesar satu triliun maka Penyerapan Tenaga Kerja akan meningkat sebanyak 6760 pekerja
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010 - 2020 dengan koefisien sebesar 383842,6 maka setiap peningkatan IPM sebesar 1 maka akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 383.842 pekerja
3. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada Tahun 2010-2020 dengan koefisien bernilai - 0.726550. Artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan, maka setiap peningkatan UMP sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 726.550 pekerja

#### **Acknowledge**

Terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan artikel ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Badan Pusat Statistik. 2018.,Data Nasional 2018 (Metode Baru). <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>. Diakses pada tanggal
- [2] Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2019.
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
- [4] Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah), 2017-2019. <https://jabar.bps.go.id/indicator/155/101/1/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Agustus 2019.
- [6] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019.
- [7] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2020. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020.
- [8] Baeti, N. 2012. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*.
- [9] Bank Indonesia. Februari 2020. Urgensi Menjaga Resiliensi Di Tengah Perlambatan
- [10] Ekonomi-Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat 2020.
- [11] Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [12] Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Gujarati, D. N. 2007. Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- [14] Gujarati, D.N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). Buku2. Edisi 5. Jakarta: Salemba.
- [15] Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Dalam Edisi Ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- [16] Todaro, M. P. & Smith, S. C. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta:



Erlangga.

[17] UNDP. 1996. Human Development Repor. New York: United Nations Development Programme